

Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Bangunan Sistem Pendidikan Nasional

Muhammad Abrar Parinduri^{1*} Zuliana²

Universitas Medan Area^{*1}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara²

^{*1}*email: abrarparinduri@staff.uma.ac.id*

Abstract

The presence of modernization in the world of Islamic education seems to be a necessity that cannot be avoided. The birth of reformer figures in the Islamic world who came from the Middle East and Indonesia became a separate impetus to accelerate the pace of renewal of Islamic education. This research uses library research type (library research) which is carried out using literature (literature) in the form of books, notes, and research reports from previous research. Sources of data can be obtained from documents or document studies. Document study, namely looking for data about things or variables in the form of notes or transcripts, books, newspapers, magazines, and other documents needed for research data. This research proves that the flow of renewal in Islamic education finds momentum when the Indonesian government is able to synergize with Muslim figures. Likewise, the accommodative and cooperative attitude displayed by some Indonesian Muslim leaders and Islamic community organizations has contributed to the government's belief that advancing Islamic educational institutions is not something that is scary but will add stability to the condition of government and politics in Indonesia. It is at this stage that the reform of Islamic education is ultimately integrated into the national education system.

Keywords : *Reform, Islamic Education, National Education*

Artikel Info

Received:

20 February 2021

Revised:

23 April 2021

Accepted:

02 June 2021

Published:

10 June 2021

Abstrak

Kehadiran modernisasi dalam dunia pendidikan Islam tampaknya merupakan sebuah keharusan yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Lahirnya para tokoh pembaharu dalam dunia Islam yang berasal dari Timur Tengah maupun Indonesia menjadi daya dorong yang tersendiri untuk

mempercepat laju pembaharuan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sumber data di dapat dari dokumen atau studi dokumen. Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk data penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa arus pembaharuan pendidikan Islam menemukan momentumnya ketika pemerintahan Indonesia mampu bersinergi dengan para tokoh-tokoh muslim. Begitupun sebaliknya, sikap akomodatif dan kooperatif yang ditampilkan sebagian tokoh-tokoh Muslim Indonesia dan organisasi kemasyarakatan Islam ikut menambah kepercayaan pemerintah bahwa memajukan lembaga pendidikan Islam bukanlah sesuatu hal yang menakutkan akan tetapi akan menambah kestabilan dalam kondisi pemerintahan dan politik di Indonesia. Pada tahapan inilah pembaharuan pendidikan Islam pada akhirnya menyatu dalam sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci : *Pembaharuan, Pendidikan Islam, Pendidikan Nasional*

A. Pendahuluan

Pasca tragedi 11 September 2001 yang dikenal dengan “9/11” di Amerika Serikat, membuka munculnya pertanyaan tentang Islam, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan keterkaitannya dengan proses pendidikan yang berlangsung di dunia Islam. Mereka menduga bahwa pendidikan Islam, terutama madrasah, telah menjadi tempat persemaian ideologi-keagamaan yang bersifat radikal bahkan menyebutnya sebagai

tempat pelatihan teroris dan lembaga pendidikan yang mendorong penggunaan kekerasan dalam jihad menegakkan Islam. Dalam konteks inilah kemudian perhatian internasional terhadap madrasah semakin meningkat.

Khusus untuk Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mendapat sorotan tajam. Pesantren dicitrakan media Barat sebagai tempat pertumbuhan radikalisme dan militansi Islam, terutama setelah lembaga pendidikan ini dikaitkan dengan bom

Bali pada 2002. Dapat dikatakan bahwa pencitraan media massa Barat tentang pesantren adalah negatif. Pada September 2003, untuk menyebut contoh, *Journal of Asian Affairs* menuduh bahwa pesantren Indonesia sama dengan madrasah di Pakistan. Secara khusus Pesantren al-Mukmin Ngruki, yang berlokasi di salah satu pusat kebudayaan Jawa di Solo mengutip Internasional Crisis Group (ICG) sebagai pusat jaringan muslim militan di Indonesia yang secara internasional merupakan jaringan al-Qaeda. (Phol, 2006)

Pandangan internasional yang tajam tersebut, yang disertai stereotype tentang pendidikan Islam, pada umumnya tidak disertai sebuah pemahaman yang memadai atau tidak bersedia memahami lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di Indonesia, dengan segala kompleksitasnya. Terdapat kesan bahwa pencitraan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan sebuah sistem yang monolitik. Mengabaikan keragaman dan kompleksitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia akan mendapatkan pencitraan dan *stereotype* yang salah

sebagaimana telah diperlihatkan oleh media massa Barat.

Di samping itu, terdapat pandangan yang secara intensif disebarkan media massa Barat untuk melihat Islam sebagai ancaman. John L. Esposito, telah memberikan gambaran tentang bagaimana Barat mempersepsikan Islam sebagai ancaman. Persepsi itu tidak hanya muncul dalam media massa Barat, tetapi pada tingkat tertentu juga dapat dijumpai dalam pandangan kalangan akademisi. Esposito mengambil contoh kuliah Bernard Lewis, “Islamic Fundamentalism” yang disampaikan Jeferson yang sangat prestisius pada 1990. Kuliah yang ketika terbit diberi judul baru, “The Roots of Muslim Rage”, memberikan sebuah gambaran tentang relasi muslim dengan Barat yang dipenuhi amarah, kebencian, dan irasionalitas (John L Esposito, 1995). Puncak persepsi Barat yang menempatkan Islam sebagai ancaman terdapat dalam Samuel Huntington, *The Clash of Civilitation*, yang menempatkan Islam dan Barat sebagai peradaban (*civilitation*) yang saling berhadapan dan berkompetisi setelah perang dingin berakhir (Huntington, 1996).

Lembaga pendidikan Islam bukan institusi tunggal yang bersifat monolitik seperti yang dicitrakan media massa Barat. Setelah mengalami transformasi dan modernisasi sejalan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan, dan perjumpaan budaya (*culture encounter*) dengan gagasan yang bersifat global (Ahmad & Ghavifekr, 2014). Lembaga pendidikan Islam, termasuk Indonesia, menyajikan sebuah gambaran yang kompleks. Kompleksitas tidak hanya terjadi dalam proses modernisasi yang berlangsung, tetapi juga model-model kelembagaan dan substansi pembelajaran sebagai respons terhadap modernisasi. Modernisasi pendidikan Islam berlangsung sejak awal abad ke-20, sebuah periode yang menandai awal bangkitnya modernitas di dunia Islam. Pada periode tersebut, dunia Islam mengalami pergulatan dengan kolonialisme dan imperialisme yang menimbulkan berbagai implikasi. Di antara yang penting adalah terjadinya proses *culture encounter* di mana Islam dan modernitas menjadi wacana dominan.

B. Pembahasan

1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan sulit. Untuk mempermudah kita dalam memahami kondisi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, maka setidaknya kita dapat membaginya dalam 5 (lima) periode antara lain: pertama, zaman penjajahan Belanda, kedua, zaman penjajahan Jepang, ketiga, zaman orde lama; keempat, zaman orde baru; kelima, zaman reformasi (Schultz, Daniel F., 2002).

Kondisi pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda secara umum sangat memprihatinkan karena terus menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak baik dari pemerintah Belanda. Namun demikian, umat Islam tidak putus asa untuk berjuang dan melakukan perlawanan, hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan. Kemajuan pendidikan Islam tersebut terinspirasi antara lain oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia dan Mesir yang dibawa oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di Mekkah dan Mesir.

Para santri semakin menyadari bahwa pemerintah kolonial merupakan pemerintah kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka. Pesantren (kaum tradisionalis) yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam mengambil sikap anti terhadap pemerintahan Belanda. Karena demikian benci dan anti terhadap pemerintah Belanda, maka uang yang diterima sebagai gaji dari pemerintah Belanda dianggap sebagai uang haram. Demikian pula celana dan dasi juga dianggap haram, karena dianggap sebagai identitas Belanda. Sikap ini secara umum diambil oleh kalangan pesantren yang sering disebut kaum santri tradisional. Dengan berdasar pada dalil al-Qur'an dan al-Hadith yang berisi perintah memerangi orang kafir, dan tidak boleh mengambil pimpinan dari orang kafir ditambah lagi dengan sikap Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia, membuat kaum pesantren menaruh sikap curiga dan memusuhi Belanda. Mereka menolak bentuk bantuan apapun dari pemerintah Belanda, dan melarang melakukan berbagai hal yang identik dengan Belanda. Kelompok inilah yang pada gilirannya bersedia memanggul senjata untuk berjihad di jalan Allah

yakni berperang di medan tempur untuk mengusir kaum penjajah dan membebaskan rakyat Indonesia dari para penjajah. Dengan merujuk pada ajaran agama, mereka berangkat dengan memiliki semangat jihad yang tinggi, namun karena keterbatasan persenjataan dan teknik berperang serta solidaritas yang belum memadai, perjuangan kaum santri ini belum membuahkan hasil yang maksimal (Yatim, 1994) dan (Yunus, 1995).

Perjuangan yang melelahkan ini menuai hasil yang ditandai dengan beberapa kemajuan antara lain sebagai berikut. *Pertama*, lahirnya para ulama besar yang memiliki pengaruh baik di dalam maupun mancanegara, sebagaimana tergambar pada buku Jaringan Ulama Nusantara dan Timur Tengah Abad ke XVII dan XVIII Masehi yang ditulis oleh Azyumardi Azra. Diantara ulama tersebut antara lain Nur al-Din al-Raniri (w.1068), Abdurrauf al-Sinkili (1042-1105 H), Muhammad Yusuf al-Makassari (1037-1111 H), dan ulama lainnya (Azra, 2013). *Kedua*, pembaruan pemikiran Islam Indonesia yang terjadi di awal abad ke-19, terutama di Sumatera Barat dan Jawa pada umumnya berkisar pada

dimensi gerakan pendidikan, sosial dan politik. Namun demikian, yang menjadi pusat perhatian pembaruan adalah pemikiran keagamaan. Hal ini dapat dipahami, karena lembaga pendidikan dan sosial yang ada pada saat itu selain sifatnya masih tradisional dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan.

Namun disaat bersamaan terdapat gerakan pembaruan pendidikan Islam yang secara sistemik dan teknis meniru pola pendidikan Belanda, meskipun secara jiwa dan muatannya tetap dijiwai oleh ajaran Islam dan semangat modernisasi. Gerakan pembaruan pendidikan tersebut mengambil bentuk mendirikan madrasah yang terdapat di Jawa yang relatif lebih baik dan maju. Lembaga pendidikan Islam yang mengambil corak pembaruan antara lain Adabiyah School (1909 M), Diniyah School Lanai al-Yunusi (1915 M), dan Sumatera Tawalib di Sumatera Barat. Kemudian diikuti oleh Madrasah Nahdatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thulab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jami'at al-Khair di Jakarta, Madrasah

Amiriah Islamiah di Sulawesi, dan Madrasah al-Sulthaniyah di Kalimantan.

Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam (madrasah) mulai terpengaruh oleh sistem pendidikan modern, yaitu sekolah, baik dalam sistem maupun bentuknya, dan lain sebagainya, di samping memuat pelajaran agama, juga memuat mata pelajaran umum. Kemudian, kelompok tradisional mulai mengikuti kaum modernis yakni mendirikan madrasah yang tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama tetap juga mempelajari ilmu-ilmu umum. Dengan demikian terdapat tiga sikap yang ditempuh umat Islam dalam merespons kebijakan pendidikan Belanda. *Pertama*, kelompok yang mengisolasi diri atau non-kooperatif dengan kebijakan Belanda sebagai musuh yang harus dibenci dan dijauhi. Mereka berpendapat bahwa kerjasama dengan Belanda tidak dapat dibenarkan, baik secara akidah maupun kemanusiaan. Sikap non-kooperatif ini banyak dilakukan oleh para ulama salaf yang memimpin pesantren yang pada umumnya tersebar di pedesaan. *Kedua*, kelompok yang bersikap akomodatif secara selektif dan proporsional. *Ketiga*, kelompok yang sepenuhnya mengambil

model pendidikan Belanda. Dalam perjalanan selanjutnya, kelompok modernis juga memilih untuk mengambil jarak lebih jauh lagi dengan pemerintah Belanda karena perlakuan mereka yang semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Sikap ini dipilih kaum modernis sebagai perlawanan secara tidak langsung terhadap pemerintah Belanda.

Perpindahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru menemukan momentumnya ketika Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30-S-PKI) yang menelan korban 7 orang jenderal dan satu orang putri Jenderal Abdul Haris Nasution, bernama Ade Irma Suryani. Dengan keterlibatan dalam peristiwa tersebut, Soekarno dianggap sudah mengkhianati Pancasila yang dibuatnya sendiri, dan karenanya ia harus melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI. Untuk itu, Soekarno diminta untuk menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Sebelas Maret (Supersemar) yang antara lain memberikan kepercayaan dan mandat kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pemulihan

keamanan dan ketertiban, dan dengan demikian Soekarno tidak lagi melakukan tugas-tugas sebagai kepala negara. Hingga akhir hayatnya ia menjadi tidak berdaya dan dijadikan tahanan rumah.

Kejatuhan Soekarno juga sejalan dengan adanya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, turunkan harga barang, dan bersihkan para pejabat dari antek-antek PKI. Tuntutan ini demikian kuat seiring dengan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, tekanan PKI, dan berbagai masalah lainnya sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, ABRI, dan ormas Islam, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lainnya menggalang aksi bubarkan PKI dan antek-anteknya. Selanjutnya melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan tugas memulihkan keamanan dan kestabilan negara dalam berbagai bidang, serta menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk kepentingan ini Soeharto dan kawan-kawannya membentuk organisasi politik

Golongan Karya yang terdiri dari unsur pejabat yang progresif, ABRI, dan beberapa tokoh elite politik yang mengedepankan kerja nyata daripada berwacana. Pada pemilu tahun 1970-an Golkar keluar sebagai pemenang yang selanjutnya memudahkan bagi Soeharto untuk dipilih oleh MPR yang mayoritas Golkar untuk menjadi presiden selama 5 periode, atau sekitar 32 tahun, yakni sejak 1967-1998 (Syamsuddin, 2001).

2. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Kondisi pendidikan Islam pada zaman Orde Baru tidak jauh berbeda dengan kondisi kebijakan yang dilahirkan pemerintah pada sektor yang lain, kesemuanya di arahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi yang didukung oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan yang sentralistik, monoloyalitas, dan monopoli. Adapun kebijakan dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut.

Pertama, masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dimulai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama,

dan Menteri Dalam Negeri. Di dalam SKB 3 Menteri tersebut antara lain dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya, berhak mendapatkan bantuan sarana prasarana, biaya, dan diakui ijazahnya. Selain itu, lahir pula Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 yang memasukkan pendidikan Islam mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang regulasi, bantuan keuangan, dan sumber daya manusia.

Kedua, pembaruan madrasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non fisik. Pada aspek fisik pembaruan dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas, seperti buku, perpustakaan, dan peralatan laboratorium (Maksum, 2009). Adapun pada aspek nonfisik meliputi pembaruan bidang kelembagaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses belajar mengajar, jaringan information technology (IT), dan lain sebagainya. Pembaruan madrasah dan pesantren ini ditujukan

agar selain mutu madrasah dan pesantren tidak kalah dengan mutu sekolah umum, juga agar para lulusannya dapat memasuki dunia kerja yang lebih luas. Hal ini dianggap penting, agar lulusan madrasah dan pesantren dapat memiliki berbagai peluang untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas, dengan demikian umat Islam tidak hanya menjadi objek atau penonton pembangunan, melainkan dapat berperan sebagai pelaku atau agen pembaharuan dan pembangunan dalam segala bidang. Dengan cara demikian, umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Usaha pembaharuan pendidikan madrasah dan pesantren ini tampak cukup berhasil, karena tamatan madrasah dan pesantren tersebut tidak hanya dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi Islam, melainkan juga dapat memasuki perguruan tinggi agama dan umum yang bergengsi baik di dalam maupun luar negeri.

Melalui usaha pembaharuan madrasah dan pesantren ini, para lulusan madrasah dan pesantren ada yang dapat melanjutkan ke Universitas al-Azhar Kairo, Mesir; Universitas Ummul Qura di Makkah, dan Universitas Madinah,

serta beberapa perguruan tinggi Islam lainnya di Afrika Utara, Maroko, Sudan, dan Turki. Melalui usaha pembaharuan madrasah dan pesantren ini, para lulusannya ada yang dapat melanjutkan ke Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, dan Australia. Melalui usaha pembaharuan pendidikan madrasah dan pesantren ini, maka pada zaman Orde Baru telah lahir kelompok elite Muslim terpelajar yang memiliki akses ke dunia kerja di pemerintahan dan berbagai lembaga pemerintah dan swasta yang bergengsi. Para lulusan pendidikan Islam tersebut pada zaman Orde Baru ada yang berhasil menjadi Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para direktur, dan direktur jenderal. Pembaharuan pendidikan madrasah dan pesantren ini dibantu oleh pemerintah melalui dana, baik yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun dana yang berasal dari pinjaman luar negeri, seperti dari Islamic Development Bank (IDB) dan Asian Development Bank (ADB) (Jabali & Jamhari, 2003).

Ketiga, pemberdayaan pendidikan islam non-formal. Pada zaman Orde Baru pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam non-formal yang dilaksanakan atas inisiatif masyarakat mengalami peningkatan yang amat signifikan. Pendidikan Islam non-formal tersebut tersebut antara lain dalam bentuk majelis taklim baik untuk kalangan masyarakat Islam kelompok, masyarakat biasa, maupun bagi masyarakat menengah ke atas. Berbagai majelis taklim baik yang diselenggarakan lembaga-lembaga kajian, maupun majelis taklim yang lain mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada zaman Orde Baru ini misalnya telah muncul ribuan majelis taklim kaum ibu yang selanjutnya tergabung dalam BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten, kota, dan kecamatan. Melalui lembaga pendidikan Islam non-formal ini, menyebabkan Islam semakin melesat ke dalam kehidupan masyarakat, dan mendorong lahirnya masyarakat kota yang semakin religius. Keadaan ini pada gilirannya semakin meningkatkan jumlah kalangan masyarakat Islam elite tingkat atas dan menengah untuk melaksanakan ibadah

haji dan terjun ke dalam kegiatan pendidikan Islam (Teba, 1993).

Sejalan dengan itu, maka muncul pula apa yang disebut sebagai santri kota, yaitu masyarakat kota yang semakin cinta pada Islam dan berusaha mengamalkannya dengan baik. Dan untuk itu, maka kegiatan ceramah agama semakin semarak, dan buku-buku atau bahan bacaan yang berkaitan dengan pembinaan mental spritual semakin diminati. Keempat, peningkatan atmosfer dan suasana praktik sosial keagamaan. Dalam kaitan ini, pemerintah Orde Baru telah mendukung lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial, budaya, dan kesenian Islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Harian Umum Republika, Undang-undang Peradilan Agama, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan lainnya lahir pada zaman Orde Baru. Ini merupakan wujud dari kerja keras pembaharuan pendidikan Islam.

Akibat terlalu lama berkuasa serta banyaknya kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia , maka pemerintahan Orde Baru resmi berakhir

pada tahun 1998 dan jabatan Presiden RI pada waktu itu beralih kepada Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie (sebelumnya menjabat Wakil Presiden RI). Presiden Habibie melaksanakan pemerintahannya hanya 1 tahun karena banyak desakan agar segera dilakukan Pemilihan Umum. Setelah Pemilu tahun 1999 terpilihlah Presiden RI yakni Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid melaksanakan pemerintahan hanya 3 tahun, setelah itu digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sampai tahun 2004. Di tahun 2004 dilaksanakan lagi pesta demokrasi memilih presiden dan wakil presiden, dan pada pemilu ini presiden dan wakil presiden yang terpilih masing-masing adalah Soesilo Bambang Yudhoyono dan Muh. Jusuf Kalla. Dan pada tahun 1999 sampai dengan sekarang ini dikenal dengan sebutan zaman reformasi.

Faktor birokrasi dan pemangku kepentingan selalu menjadi permasalahan tersendiri bagi pendidikan terutama di negara-negara berkembang seperti halnya juga terjadi di Indonesia (Habibat Abu bakar Yusuf, 2019). Kondisi pendidikan Islam pada zaman reformasi secara umum jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Adapun kondisi tersebut antara lain sebagai

berikut. *Pertama*, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma'had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-kanak), dan majelis taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya berlaku di bawah

naungan Kementerian Pendidikan Nasional melainkan juga berlaku pada wilayah Kementerian Agama (Rahim, 2001).

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. APBN Tahun 2010, misalnya menetapkan bahwa dana tersebut dialokasikan bagi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai provinsi yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total anggaran pendidikan dari APBN. Adapun sisanya, yakni 40 persen diberikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, serta berbagai kementerian lainnya yang

menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, sebagian besar anggaran pendidikan diserap oleh 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dari 40 persen anggaran pendidikan tersebut diberikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional 80 triliun, Kementerian Agama 27 triliun, dan kementerian lainnya sekitar 3 triliun. Dengan demikian, jumlah dana yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya sebanyak 110 triliun. Adapun total anggaran pendidikan seluruhnya (20 persen dari APBN) sebanyak 240 triliun. Dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, dunia pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya (Muhaimin, 2006).

Ketiga, program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Program wajib belajar ini tidak hanya berlaku untuk peserta didik yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional tetapi juga berlaku untuk peserta didik yang

berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari golongan keluarga kurang mampu yakni tidak dibebankan biaya operasional pendidikan karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) (Jamas, 2009).

Keempat, munculnya praktik penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional (Mastuhu, 2003). *Kelima*, adanya kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum, maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Program ini sebagai tindak lanjut dari program peningkatan mutu

guru dan dosen yang telah dicanangkan oleh pemerintah. *Keenam*, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (subjek matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisis (Asegaf, 2003).

Ketujuh, ragam pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher oriented) melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada siswa (student oriented) melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem). Dengan ragam metode ini, pembelajaran di kelas tidak lagi bersifat monoton seperti ceramah dan mendengarkan bimbingan guru

melainkan diskusi, seminar kelompok, pemecahan masalah, penugasan, penemuan dan lain sebagainya.

Lahirnya berbagai macam kebijakan terkait pendidikan pada zaman reformasi ini secara tidak langsung menghilangkan kesan dikotomis antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Disamping itu pemerintah juga berupaya menghilangkan diskriminasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pemerintah era Reformasi telah mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi payung hukum atau perundang-undangan, anggaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Upaya integrasi tersebut dalam rangka menghilangkan kesan dikotomis dan diskriminasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.

Kondisi pendidikan agama pada masa reformasi juga berdampak positif pada pemerintahan daerah khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan, seperti halnya Bupati Pasaman Barat periode 2007 telah mengambil kebijakan yang terkait

dengan peningkatan kemampuan membaca al-Qur'an bagi setiap anak di wilayah pemerintahan yang dipimpinnya. Pada akhirnya wali nagari merespon positif Perda tersebut karena sangat bermanfaat bagi perkembangan anak dalam membaca al-Qur'an (Mursal, 2020).

Hal yang sama juga dilakukan oleh perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam mempelajari mata kuliah agama Islam yakni dengan pembentukan kepribadian Islami melalui kegiatan Penanaman Nilai Dasar Islam (PNDI) dan kepemimpinan profetik melalui Latihan kepemimpinan Islam Dasar (LKID) sedangkan strategi pembelajaran meliputi keterampilan transformatif dan pembelajaran integratif (Makruf, 2020). Lahirnya kebijakan ini juga tidak terlepas dari kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan pasca reformasi.

3. Pembaharuan Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

Awal pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia sesungguhnya ditandai dengan terbitnya SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P&K,

dan Menteri dalam Negeri) No.6 Tahun 1975 menyatakan bahwa madrasah yang notabeneanya berada di pesantren pada semua jenjang pendidikan kini sama posisinya dengan sekolah umum dan konsekuensinya kurikulum madarasah haruslah 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama. SKB Tiga Menteri ini merupakan salah satu tonggak terpenting dalam integrasi pendidikan Islam ke dalam mainstream pendidikan nasional, dan sekaligus peningkatan kualitas SDM yang belajar pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dampak yang lebih jauh lagi, kebijakan Tiga Menteri ini pada hakikatnya merupakan langkah awal bagi “reintegrasi” ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam (Afrianty & Burhanudin, 2006).

Kendatipun kebijakan Tiga Menteri ini semula mendapat tantangan keras dari kalangan pengelola pendidikan Islam pesantren dan madrasah khususnya tapi spirit modernisasi madrasah dan pesantren sudah tidak dapat ditunda lagi. Dalam spirit modernisasi itu, madrasah dan pesantren berhadapan dengan “krisis identitas” yang memang sejak semula sudah

dikhawatirkan mereka yang menentang kebijakan tersebut. Bahwa, muatan pelajaran umum yang begitu besar, pada gilirannya dapat menghilangkan misi, substansi, dan karakter pendidikan Islam itu sendiri. Pergulatan identitas ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Sistem pendidikan Islam seringkali masih bergulat di antara harapan terhadap keunggulan akademis dan mutu lembaga pendidikan, dengan harapan sosial umat Islam bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki tugas berat melakukan pembinaan moral anak bangsa.

Terlepas dari masalah itu semua, pembaharuan pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren tampaknya sudah menjadi keharusan sejarah. Dan, pembaharuan itu akhirnya menemukan momentumnya dengan diterbitkannya UUSPN 1989 dan juga UU Sisdiknas. Dalam undang-undang ini selain mengakui sistem pendidikan Islam tetapi juga menetapkan bahwa madrasah sama derajatnya dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Dari status yang semakin kuat ini, muncul berbagai eksperimen baru dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Pasca undang-undang tersebut, lahir

sekolah-sekolah Islam swasta yang dalam perkembangannya disebut sebagai “sekolah Islam plus”, “sekolah Islam unggulan”, dan bahkan “sekolah elite Islam/ Muslim”, semacam Sekolah Islam al-Azhar, al-Izhar, Muthahari, Insan Cendekia, Madania, Dwiwarna, dan lainnya (Azra, 1999).

Bukan tanpa alasan sekolah-sekolah di atas disebut “plus”, “unggulan”, atau “elite”. Ada beberapa alasan sehingga sekolah-sekolah tersebut berhak menyandang predikat di atas, antara lain: pertama, sekolah-sekolah ini menerima siswa-siswanya sangat kompetitif dari segi akademis maupun keuangan; kedua, tenaga pengajar atau guru-guru diterima melalui tahapan seleksi yang sangat kompetitif; ketiga, sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga memiliki perbedaan yang jauh dengan sekolah-sekolah Islam bahkan sekolah negeri lainnya. Berangkat dari kondisi seperti ini, maka wajar jika dikemudian hari mereka memiliki mutu kelulusan yang lebih baik dan unggul.

Akan tetapi berbeda halnya dengan Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang sama sekali tidak terpengaruh dengan menambahkan predikat unggul dan plus. Pondok Modern Darussalam

Gontor (PMDG) merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis pesantren ternama di Indonesia. Usianya sudah lebih dari 90 tahun, namun dalam rentang usia itu, uniknya pondok ini tetap diminati masyarakat walau sama sekali tidak melakukan promosi iklan lewat media apapun. PMDG telah menentukan positioning-nya sebagai lembaga pendidikan yang mencetak pemimpin-pemimpin di masyarakat. Orientasi pendidikan dan pengajaran PMDG adalah orientasi keislaman, keilmuan dan kemasyarakatan. Saluran-saluran pemasaran yang terbentuk secara alami merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah konsep baru yaitu *spiritual marketing* (Fahamsyah, 2019).

Ketika pendidikan Islam Indonesia baru saja berkembang dan menemukan momentumnya pada awal abad ke-20, muncul tantangan berikutnya yakni globalisasi dengan segenap perkembangan kemajuan dan teknologi yang dibawa memaksa pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan dirinya agar tidak jauh tertinggal dan juga tidak menjadi pengikut sejati. Pada akhirnya berbagai kecenderungan perkembangan baru pendidikan yang muncul sebagai

dampak atau konsekuensi globalisasi mesti diadopsi sistem pendidikan nasional. Secara ringkas, kenyataan ini tercermin dalam rumusan paradigma baru pendidikan nasional yang mencakup arah sebagai berikut: desentralistik (otonom); kebijakan yang bottom up; orientasi pendidikan holistik untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya (multikulturalisme), menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum, peningkatan produktifitas masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.

Dengan demikian paradigma baru pendidikan nasional itu melahirkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pendidikan nasional antara lain: (1) Kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain; (2) Pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial; (3) Pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa; (4) Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional; (5) Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan; (6) Penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan

konsensus dalam kemajemukan; (7) Perencanaan terpadu secara horizontal (antarsektor) dan vertikal (antarjenjang); (8) Pendidikan berorientasi peserta didik; (9) Pendidikan multikultural; (10) Pendidikan dengan perspektif global.

Permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam pasca pembaharuan yang sedang dan akan terus berlangsung hingga masa depan adalah sebagai berikut: Pertama, jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan. Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak 1970-an dan peluang-peluang baru seperti diisyaratkan dalam paradigma baru pendidikan nasional setidaknya menghasilkan empat pilihan: *Pertama*, pendidikan yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din*, seperti yang ada dalam tradisi pesantren pada masa pra-modernisasi (pesantren salafiyah), dengan kurikulum yang hampir sepenuhnya ilmu agama. Di tengah arus pembaharuan ini semakin banyak pesantren yang mempertahankan atau bahkan kembali kepada karakter salafiyahnya. *Kedua*, pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Depag. Madrasah yang semula adalah pendidikan agama plus umum, namun sejak kehadiran

UUSPN 1989 dan UU Sisdiknas 2003 berubah menjadi sekolah umum berciri agama. *Ketiga*, sekolah Islam “plus” atau “unggulan” yang mengikuti kurikulum Diknas, yang pada dasarnya adalah “pendidikan umum plus agama”. *Keempat*, pendidikan keterampilan (*vocational training*) seperti STM atau MA/SMU keterampilan.

Lembaga pendidikan Islam dapat melaksanakan keempat jenis pilihan ini dalam satu lembaga pendidikan Islam tertentu, atau sebagian besar atau secara keseluruhan dalam satu kelembagaan pesantren tertentu (pesantren dalam hal ini menjadi semacam “*holding company*”). Keempat pilihan ini secara implisit mengakomodasi hampir keseluruhan harapan masyarakat secara sekaligus kepada pendidikan Islam. Harapan pertama dan utama adalah agar lembaga-lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan tetap menjalankan peran pentingnya dalam tiga hal pokok: *Pertama*, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*). *Kedua*, pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*). *Ketiga*, reproduksi (calon-calon) ulama (*reproduction of ulama*). Harapan kedua adalah agar para

peserta didik tidak hanya mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Dan sebaliknya tidak hanya mengetahui ilmu-ilmu umum tetapi juga ilmu-ilmu agama. Kemudian harapan ketiga, agar para peserta didik memiliki keterampilan, keahlian atau lifeskills khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi.

C. Simpulan

Kendati banyaknya tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, tidak berarti kondisi tersebut membuat lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin terpinggirkan, namun sebaliknya dengan tantangan yang ada membuat lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin kreatif dalam menemukan model baru terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kondisi sosiologis umat Islam yang siap pakai dalam menerima perubahan tersebut dan sadar bahwa pembaharuan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari, menambah kepercayaan diri dari para pengelola lembaga pendidikan Islam untuk tetap bertahan bahkan

mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan umum yang lain. Jika kondisi demikian masih terus dapat dipertahankan, maka penulis meyakini bahwa lembaga pendidikan Islam pada masa yang akan datang tetap memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi perubahan sosial-keagamaan masyarakat muslim.

D. Daftar Pustaka

- Afrianty, D., & Burhanudin, G. J. (2006). *Mencetak Muslim Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, R., & Ghavifekr, S. (2014). The Effectiveness of Madrasah: Analysis of Managerial Skills, Learning Supervision, School Culture, and Teachers' Performance. *Malaysian Online Journal of Education*, 2(1), 48–61.
- Asegaf, A. (2003). *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra Proklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Fahamsyah, M. H. (2019). The Spiritual Marketing of Gontor in Maintaining the Position. *Jurnal Tsaqafah*, 16(4), 147–162.
- Habibat Abubakar Yusuf (PhD)¹, I. H. A. (PhD) & K. B. S. (PhD). (2019). Malaysian Online Journal of School Climate , Bureaucracy and Effectiveness in. *Malaysian Online Journal of Educational Management (Mojem)*, 7(3), 19–42.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. India: Penguin Books.
- Jabali, F., & Jamhari. (2003). *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Jamas, N. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- John L Esposito. (1995). *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*. Mizan.
- Makruf, S. A. (2020). *Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Profil Ulil Albab di Perguruan Tinggi*. 12(2), 278–289. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5321>
- Maksum, H. (2009). *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Mastuhu, M. (2003). *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Jakarta: Safria Insani Press.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mursal, A. L. (2020). *PERDA Baca Tulis al- Qur ' an : Studi terhadap Respon Wali Nagari dalam Meningkatkan Pendidikan Agama di Talu*. 12(2), 189–205.
- Phol, F. (2006). Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia *Comparative Education Review. Comparative Education Review (COMP EDUC REV)*, 50(3), 389–409. <https://doi.org/10.1086/503882>
- Rahim, H. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Schultz, Daniel F., M. F. (2002). Education, History, and Nationalism In Pramoedya Toer's "Buru Quartet." *Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, 16(2), 143–175. <https://doi.org/10.2307/40860802>
- Syamsuddin, M. D. (2001). *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Teba, S. (1993). *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yatim, B. (1994). *Sejarah Peradaban Islam Dirasat Islamiah II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, M. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Ilmu.